

**PENGARUH TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH,
PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH, DAN KEJELASAN SASARAN
ANGGARAN TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA METRO**

Oleh:

Arini Septiana Putri
Program Studi Akuntansi - Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Metro
Email: ariniseptianap@gmail.com

Pembimbing:

- 1). Yulita Zanaria, S.E., M.Si., Akt.,CA.
- 2). Nedi Hendri, S.E., M.Si., Akt., CA., ACPA., CPA., CRA.

Abstrak

Akuntansi sektor publik memiliki kaitan erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik yang memiliki wilayah lebih luas dan kompleks dibandingkan sektor swasta atau bisnis. Sebagai organisasi publik, pemerintah daerah dituntut agar memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dengan memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas. Akuntansi di sektor publik digunakan tidak hanya untuk meminimalisir kecenderungan kecurangan atau penyalahgunaan wewenang tetapi dapat juga meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh transparansi pengelolaan keuangan daerah, pengawasan keuangan daerah, dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja pemerintah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey. Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan objek penelitian adalah transparansi pengelolaan keuangan daerah, pengawasan keuangan daerah, kejelasan sasaran anggaran dan kinerja pemerintah. Populasi yang di ambil yaitu Pegawai di Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Metro dengan jumlah sampel yang diambil sebanyak 40 responden. Alat analisis yang digunakan adalah menggunakan analisa kualitas data dan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan daerah, pengawasan keuangan daerah, kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja pemerintah. Melihat signifikansi yang diperoleh maka variabel yang paling berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah adalah ttansparansi penggunaan anggaran.

Kata kunci: transparansi pengelolaan keuangan daerah, pengawasan keuangan daerah, kejelasan sasaran anggaran, kinerja pemerintah